

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Sabon, M. B. (2014). *HAK ASASI MANUSIA*. (K. Sihotang, Ed.). Jakarta: Universitas Atma Jaya Jakarta.

Susiana, S., Wahyuni, D., Martiany, D., Alawiyah, F., & Fahham, A. M. F. (2015). *Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban*. (A. M. Fahham, Ed.). Jakarta: P3DI Setjen RI dan Azza Grafika 2015.

Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *PERDAGANGAN ORANG Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.

Hamzah, J. A. (2014). *HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*. (Tarmizi, Ed.) (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, M. (2012). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM TEORI DAN PRAKTEK*. Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA.

HR, R. (2008). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

IOM Indonesia, C. T. and M. P. U. (2017). *IDENTIFIKASI DAN PANDUAN PENYEDIAAN LAYANAN KORBAN TPPO BAGI PETUGAS GARDA DEPAN DI KOTA BATAM*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Mulyadi, L. (2010). *KOMPILASI HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTIK PERADILAN*. Bandung: Mandar Maju/2010/Bandung.

IOM Indonesia, C. T. and M. P. U. (2017). *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Teguh, P. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2014). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sugiyono. (2014). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: ALFABETA BANDUNG.

Sunggono, B. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

PERATURAN PEMERINTAH :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

JURNAL :

Ambarsari Ririen, Andiyansyah Faniko, A. S. A. (2016). KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN HUMAN TRAFFICKING. *Jurnal Panorama Hukum*, 1, 16.

Hidayati, maslihati nur. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(3), 163.

Riswan, M. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.

Abdullah, D. (2016). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. *Hukum POSITUM*, 1(1), 21

Mishadin. (2012). *EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER PADA MATA PELAJARAN ELEKTRONIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI DI SMK 1 SEDAYU BANTUL*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mosal, mourin m. (2013). ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERAPAN AKUNTANSI DI KOTA MANADO. *EMBA*, 1(4), 9.

Ratnaningsih, K. I., & Suaryana, I. G. N. A. (2014). PENGARUH KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MANAJEMEN, DAN PENGETAHUAN MANAJER AKUNTANSI PADA EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 16.

Suharjono, M. (2014). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM Mendukung Otonomi Daerah. *Ilmu Hukum*, 10(19), 17.